BORNEO TRIBUNE

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des

2013

Hal. : 4

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Laporan Keuangan Pemprov Sesuai SAP

Andika Lay
Borneo Tribune, Pontianak

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, sehingga Laporan Keuangan Pemprov Kalbar TA 2012 meningkat menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan" dan dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemprov Kalbar TA 2012 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

"BPK RI menyatakan opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kalbar TA 2012 meningkat menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan," kata Anggota BPK RI VI, Dr H Rizal Djalil, Kamis (4/7) lalu di Pontianak.

Dikatakannya, hal yang menjadi catatan dalam laporan hasil pemeriksaan adalah penatausahaan Aset Tetap-Tanah, Gedung dan Bangunan masih memerlukan upaya perbaikan, serta Aset lainnya-Tunggakan UYHD masih dalam proses penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

"Kedua permasalahan tersebut tidak berdampak secara material terhadap penyajian aset tetap dan aset lainnya pada Laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2012," jelasnya.

Selain itu, masih menurut Rizal Djalil, hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2012 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan TA 2012 dan sebelumnya, terdapat 1.040 rekomendasi senilai Rp138,65 miliar yang terdiri dari 660 rekomendasi senilai Rp 66,93 miliar telah ditindaklanjuti (63,46 persen), dan sebanyak 300 rekomendasi senilai Rp 66,37 miliar belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut (28,85 persen) serta sebanyak 80 rekomendasi senilai Rp 5,35 miliar yang belum ditindaklanjuti (7,69 persen).

"Usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemprov Kalbar atas pengelolaan keuangan daerah sebagian besar telah sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Gubernur Kalbar, sehingga dalam LKPD TA 2012 telah dilakukan perbaikan dalam penyajian laporan keuangan," ujarnya.

Ia juga berharap, LHP yang telah disampaikan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2013.

Sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Gubernur beserta jajarannya diharapkan untuk segera menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.

"Momentum peningkatan opini laporan keuangan Pemprov Kalbar diharapkan dapat memicu pemerintah/Kabupaten/Kota lainnya di lingkungan Provinsi Kalbar untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," harapnya. □